

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

Hunian DP Nol Rupiah Jauh Melenceng dari Target

JAKARTA-DPRD DKI Jakarta menjadwalkan pemanggilan terhadap manajemen Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya untuk mengevaluasi kinerja perusahaan.

"Kami sudah menjadwalkan kemungkinan dua pekan akar datang," kata Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz d Jakarta. Dia menjelaskan pemanggilan itu merupakan bentuk pengawasan legislatif terhadap kinerja Perumda Sarana Jaya sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov DKI Jakarta.

"Kami juga ingin mengklarifikasi isu-isu yang berkembang terkait Sarana Jaya saat ini," kata Aziz. Menurutnya, evaluasi kinerja tidak hanya untuk Saran Jaya. Beberapa waktu lalu Komisi B juga memanggil manajemen PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta menemukan sembilan temuan terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan (LHPK) pada Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) tahun buku 2018 dan 2019. Sembilan temuan pemeriksaan itu, yakni

denda keterlambatan pada satu pekerjaan senilai Rp102 juta dan kelebihan pembayaran pada tiga kegiatan senilai Rp197 juta.

Denda keterlambatan senilai Rp4,73 miliar dan potensi kelebihan pembayaran pekerjaan senilai Rp4,55 miliar pada pelaksanaan kegiatan proyek Tower A Klapa Village. Penilaian tanah atas ruislag tanah seluas 2.000 meter persegi pada kegiatan pembebasan tanah Lebak Bulus yang tidak dilakukan oleh penilai independen. Kelemahan dalam kontrak kerja sama dan berita acara pencahiran kerja sama antara Perumda DKI Sarana Jaya dengan beberapa mitra di antaranya PT TEP dan PT ZPI.

PPSJ belum membuat berita acara pengakhiran kerja sama dengan Pejabat Park Residence. Pengembalian investasi kerja sama KSO Klapa Village tidak sesuai dengan kontrak KSO. PPSJ kehilangan pendapatan akibat pembayaran denda keterlambatan dari PT ZPI.

PPSJ berpotensi kehilangan senilai Rp4,85 miliar dan pendapatan denda dari pengakhiran kerja sama dengan PT GSA serta analisis PPSJ dalam penyertaan saham PT ER tidak mema-

dai. "Kita sudah melakukan tindak lanjut yang dilaporkan kepada BPK dan BPK akan melakukan penilaian kembali," kata Direktur Keuangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Bima P Santosa.

Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan akan mengevaluasi secara mendalam terkait sejumlah program ambisius Pemprov DKI Jakarta yang tidak mencapai target. Mujiyono mengatakan, evaluasi tersebut seiring dengan surat permohonan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait rencana perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor I Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta.

"Melihat capaian program pembangunan daerah dalam RPJMD 2017-2020 selama 2,5 tahun terakhir ini, ada sejumlah program yang perlu dievaluasi secara mendalam," kata Mujiyono belum lama ini.

Ada tiga program dalam RPJMD 2017-2020 yang masih menjadi sorotan dan harus dievaluasi, pertama mengenai program penanganan banjir. Pemprov DKI Jakarta harus menjadikan penanganan banjir menjadi program prioritas dalam perubahan RPJMD 2017-2020.

"Masalah penanganan banjir harus menjadi perhatian serius. Misalkan saja yang terkait dengan program pembangunan waduk dalam kota, vertikal drainase dan sebagainya," ujar dia. Kedua, program meningkatkan jumlah pelaku kewirausahaan sebanyak 46.554 wirausaha baru per tahunnya.

"Program ini harus dievaluasi kembali pelaksanaannya karena realisasinya jauh dari target yang ditetapkan," katanya. Ketiga terkait penyediaan DP Nol Rupiah yang masih menjadi masalah dan harus dievaluasi. Program tersebut masih menggunakan pola subsidi silang antara area pengembangan hunian DP Nol Rupiah dengan area komersial.

Program tersebut juga telah menelan anggaran yang sangat besar dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Namun sayangnya, Pemprov DKI hanya mampu membangun sebanyak 780 unit hunian DP Nol Rupiah saja yang berlokasi di Nuansa Pondok Kelapa dan 850 unit lain di Nuansa Cilangkap. Padahal, target yang dicantumkan dalam RPJMD adalah sebanyak 14 ribu unit hunian DP Nol Rupiah. (ant/dni)